

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan penstrukturan suatu negara guna mengatur serta mengelola alokasi sumber daya yang tersedia bagi perindividunya ataupun entitas dari negara itu sendiri diistilahkan dengan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah semakin maju. Ditandai dengan pertumbuhan dunia usaha yang meningkat secara signifikan, maka akuntansi memiliki peran penting dalam sistem penginformasian finansial dengan perannya ketika menyajikan catatan finansial yang bisa memberikan penjelasan keuangan dengan baik yang akan diperlukan pelanggannya, termasuk di pihak intern maupun pihak ekstern (Kalangidkk, 2014). Apabila ditinjau dari segi wilayah atau segmen terkecil salah satu cara meningkatkan perekonomian nasional adalah melalui Pemerintah Desa. Melalui usaha guna meraih target pembaharuan nasional, desa menjadi alat krusial pemerintah dalam meraih warga yang menginginkan peningkatan kesejahteraannya. Desa yang dibangun wajib diistimewakan guna meraih pembaharuan nasional dikarenakan berkaitan erat pada usaha ekspansi Indonesia dimulai batasannya melalui perkuatan tiap kawasan (Maharani 2015). Diharapkan dengan dana operasionalnya dialokasikan kepada pengurus desa yang berasal dari dana desa, terdapat potensi percepatan pertumbuhan ekonomi di desa sehingga berdampak pada peningkatan kinerja bidang ekonomi nasional. Badan Permusyawaratan Desa membawahi dan mewakili kepentingan warga desa setempat dengan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di bawah

pemerintahan desa. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan efisiensi perekonomian dan mengoptimalkan sumber daya dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada melalui pembangunan serta penjagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah badan yang diupayakan pemerintahan desa untuk dibangun, didanai melalui permodalan pemerintah daerah, simpanan masyarakat, dukungan pemerintah pusat, provinsi, beserta kabupaten, peminjaman, ataupun keikutsertaan permodalan pihak lainnya melalui pembagian perolehannya. Sesuai persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BUMDes mempunyai kewenangan memberikan pinjaman. Mayoritas atau seluruh modal BUMDes dimiliki dan dikelola oleh desa, dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut digunakan untuk kesejahteraan desa. Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan BUMDes dalam mensejahterakan desa, kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan.

BUMDes dijadikan sebagai unit usaha guna menelusuri kekuatan beserta kecakapan desa dan warganya supaya mampu mencukupi keperluan kolektif warga secara keseluruhan sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes ialah sebuah aspek krusial yang telah dicantumkan pada Peraturan Desa. Dasar hukum pembentukan BUMDes tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Ketika pembentukannya, pemerintah desa maupun pimpinan memiliki pertanggungjawaban untuk melaksanakan penyeteroran laporan finansial bersesuaian pada standar akuntansi secara global agar bisa dipahami para pihak penerimanya sebagai pengambilan keputusan. Maka dari itu, pada sebuah komunitas atau perusahaan penganjuran mencantumkan

pertanggungjawaban yang dilaporkan ditekankan guna disusun secara baik serta benar serta bisa dimengerti.

Pada periode 2021, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyoroti Provinsi Bali yang menonjol sebagai provinsi tanpa desa yang tergolong tertinggal atau sangat tertinggal. Pencapaian ini tidak lepas dari kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disertai kepunyaan peran penting di tiapdesa Bali. Hingga tahun 2020, Bali mencatatkan 588 BUMDes yang menyumbang total omzet Rp 247,98 Miiliar (www.cnn.indonesia.com).

Sebuah kabupaten di Provinsi Bali dengan memiliki ratusan BUMDes ialah Kabupaten Buleleng. Di setiap kecamatan di Kabupaten Buleleng terdapat 126 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mewujudkan Buleleng menjadi kabupaten kaya akan BUMDes. Tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi di setiap desa. Namun demikian, terdapat tantangan yang terkait dengan BUMDes tertentu di Kabupaten Buleleng, termasuk contoh salah urus dan dugaan penipuan. Peneliti Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Desa Kabupaten Buleleng mengumpulkan pendataan BUMDes terkendala berdasarkan temuan awal. Berdasar penelusuran permulaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat serta Desa Kabupaten Buleleng, peneliti mendapatkan sejumlah pendataan mengenai BUMDes dengan kondisinya yang mengalami kendala perJanuari 2021, yakni:

Tabel 1. 1
Data BUMDes Yang Bermasalah di Kabupaten Buleleng

No.	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan
1	BUMDesa Teja Kusuma	Tejakula	Tejakula
2	Kertha Sari Waringin	Julah	Tejakula
3	Loka Mandara	Lokapaksa	Seririt
4	Mandiri Bersama "GSM"	Mayong	Seririt

5	BUMDesa Tunas Kerta	Tigawasa	Banjar
6	Sucia Dhana Subiksa	Pedawa	Banjar
7	BUMDesa Sadu Amerta	Tirtasari	Banjar
8	BUMDesa Gema Matra	Pucaksari	Busungbiu
9	BUMDesa Bongancina	Bongancina	Busungbiu
10	Widya Sari	Bengkel	Busungbiu
11	Jangkar Mas	Celukan Bawang	Gerokgak
12	Jagat Dhita	Pengulon	Gerokgak
13	Amartha	Patas	Gerokgak
14	Praja Sidhi Yowana	Kubutambahan	Kubutambahan
15	BUMDesa Sari Nadi	Tambakan	Kubutambahan
16	Santhi Amertha	Bukti	Kubutambahan
17	BUMDesa Karya Sari	Pakistan	Kubutambahan
18	BUMDesa Banwa Bharu	Bebetin	Sawan
19	Sari Guna Amertha	Sinabun	Sawan
20	BUMDesa Kusuma Asri	Bungkulan	Sawan
21	BUMDesa Wana Amertha	Galungan	Sawan
22	Muncul Sari Aji	Sudaji	Sawan
23	Pandan Harum	Selat	Sukasada

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Buleleng

Tabel 1.2

Persentase BUMDes Bermasalah PerKecamatan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Persentase BUMDes Bermasalah
1	Gerogak	23,07%
2	Seririt	11,76%
3	Busungbiu	25,00%
4	Banjar	18,75%
5	Sukasada	7,69%
6	Buleleng	0%
7	Sawan	41,66%
8	Kubutambahan	33,33%
9	Tejakula	22,22%

Berpedoman pendataannya, dapat didapatkan informasi bahwasanya adanya 23 BUMDes yang berkendala ditiap kecamatannya yang ada di Kabupaten Buleleng. Terlihat dari data tersebut kecamatan Sawan memiliki jumlah kasus BUMDes bermasalah yang paling banyak. BUMDes bermasalah adalah BUMDes yang didalamnya terdapat kasus-kasus kecurangan yang sangat berkaitan dengan pengelolaan keuangan. BUMDes Kecamatan Sawan mendominasi aktivitas upaya

simpanpinjam, aairbersih serta pasar desa yang menjadi upaya dasar operasionalnya. Aktivitas simpanpinjam diselenggarakan guna mengumpulkan dan mendistribusikan pendanaan di masyarakat pedesaan. Berbagai lembaga keuangan seperti koperasi, LPD, BPR, Pegadaian, dan lainnya juga beroperasi di sektor ini, sehingga menyoroti keberagaman dalam industri simpan pinjam. BUMDes harus bersaing secara efektif dengan berbagai lembaga keuangan tersebut untuk mempertahankan relevansi dan keunggulannya dalam masyarakat desa.

Kasus-kasus kecurangan yang banyak terjadi pada BUMDes kecamatan Sawan menjadi salah satu tolak ukur yang memberikan cerminan bahwa kinerja keuangan pada BUMDes kecamatan Sawan perlu diperbaiki. BUMDes harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik untuk mengkonfirmasi bahwanya keseluruhan keluar-masuknya dana itu sendiri melalui faktanya dan transparan. Keadaannya akan mencegah kasus kecurangan serta meningkatkan kinerja keuangan BUMDes. Kinerja keuangan yang buruk atau tidak terkendali dalam sebuah BUMDes dapat menciptakan peluang bagi tindakan kecurangan. BUMDes yang mengalami kesulitan keuangan atau memiliki masalah dalam mengelola sumber daya keuangannya dapat menjadi target potensial bagi individu yang mencari peluang untuk melakukan kecurangan. Kinerja keuangan yang buruk mampu menimbulkan desakan di management atau staf guna menelusuri berbagai metode tidak sah untuk memperbaiki situasi keuangan (Lesmana dan Parlina, 2021). Kinerja keuangan merujuk pada penilaian dan analisis tentang bagaimana sebuah organisasi atau entitas mengelola dan menghasilkan dana serta mengukur keberhasilannya dalam mencapai tujuan-tujuan keuangan tertentu. Kinerja keuangan mencerminkan sejauh mana sebuah organisasi mampu memanfaatkan

sumber daya finansialnya untuk mencapai tujuan bisnis atau operasional yang ditetapkan. Kinerja keuangan yang baik akan menciptakan citra lembaga serta kepercayaan dari masyarakat.

Kinerja keuangan yang baik tak lepas pada peranan beserta semua aspek lembaga. Salah satu terpenting adalah pengawas. Dalam kasus kecurangan di BUMDes Kecamatan Sawan, Koordinator PEMDES memaparkan keberadaan BUMDes terkendala itu dikarenakan minimnya peninjauan, serta mutu SDMnya masih kurang dalam pengelolaan keuangan pada BUMDes.

Kurangnya pengawasan ini menjadi salah satu faktor adanya kecenderungan kecurangan pada akuntansi. Kecurangan (*Fraud*) ialah perilaku disengaja yang mengakibatkan kerugian dengan menggunakan sumber daya Bumdes untuk kepentingan pribadi. Contohnya, di Bumdes Desa Sudaji, telah terjadi manipulasi dalam pelaporan keuangan yang tidak jelas dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, di Bumdes Desa Galungan, ketidakadaan setoran air yang dilaporkan ke Bumdes serta pelaporan keuangan yang tidak disajikan secara lengkap menunjukkan kekurangtransparan yang dapat merugikan Bumdes dan masyarakatnya. Kecacatan pencatatan serta kecurangan tersebut menggambarkan kinerja keuangan yang sangat kurang. Ketika pengawasan internal dan eksternal dalam ketidakaktifan BUMDes, sehingga ada kesempatan besar untuk individu guna menjalankan *fraudnya* melakukan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan. Tanpa pengawasan yang ketat, orang-orang dalam organisasi mungkin merasa mereka bisa menghindari deteksi dan hukuman. Ketidakefektifan pengawasan juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan keuangan. Kegagalan dalam memeriksa dan memvalidasi pencatatan keuangan dapat mengakibatkan laporan

yang tidak akurat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang salah (Yasa dan Sujana, 2023). Situasi ini disebut *ineffective monitoring*. *Ineffective monitoring* adalah istilah yang mengacu pada kurangnya pengawasan atau pemantauan yang efektif dalam suatu organisasi atau entitas. Dalam konteks keuangan, itu merujuk pada kegagalan dalam menjalankan proses pengawasan yang memadai terhadap transaksi keuangan, praktik bisnis, dan prosedur yang berlaku. *Ineffective monitoring* dapat menyebabkan berbagai masalah dan risiko, termasuk peningkatan potensi untuk tindakan kecurangan, kesalahan, atau kebijakan yang tidak sesuai (Hendra dan Nugroho, 2022).

Apabila BUMDes tidak memiliki sistem pengawasan internal yang efektif, audit internal yang dilakukan oleh tim internal BUMDes juga dapat menjadi terbatas dalam menciptakan pengawasan yang baik. Audit internal akan lebih efektif ketika ada kontrol internal yang kuat yang dapat diaudit dan dipantau. Ketidakefektifan pengawasan internal dapat menghambat kemampuan tim audit internal untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Pada BUMDes sendiri audit dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui www.blog.bumdes.id, bahwa audit pada BUMDes dapat dilakukan oleh pengawas desa, pengawas kabupaten atau inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Audit pun mampu dijalankan Badan Pemeriksa Keuangan apabila terdapat amanat undang-undang atau perintah hukum lainnya. Badan Pengawasan Keuangan serta Pembangunan (BPKP) ialah institusi pengawas eksternal dengan bertugas mengawasi serta memeriksa penggunaan keuangan negara. Oleh karena itu, apabila BUMDes mengalokasikan dana desa atau menerima hibah dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten, mereka dapat

berkoordinasi bersama BPKP guna memastikan bahwa proses penggunaannya berdasar aturan penetapan hukum di Indonesia.

Pengaruh *ineffective monitoring* terhadap kinerja keuangan khususnya pada pencegahan kecurangan dalam catatan finansialnya sudah dilaksanakan sebelumnya yakni kajian Krisnawati dan Masdiantini (2022) serta kajian Azizah (2022) dengan perolehan *ineffective monitoring* berdampak positif serta signifikan pada kinerja keuangan khususnya pada pencegahan kecurangan dalam catatan finansial. Di lain sisi, hasil berlawanan ditemukan Utami dkk (2022) yakni *ineffective monitoring* tidak memengaruhi kinerja keuangan yang diasumsikan kedalam kecurangan laporan keuangan. Inkonsistensi hasil yang diperoleh menjadi motivasi peneliti untuk menguji kembali terkait pengaruh *ineffective monitoring* pada kinerja keuangan secara spesifik.

Audit internal yaitu proses evaluasi independen yang dilakukan oleh tim audit dalam atau auditor internal pada suatu keorganisasian guna mengetes serta menilai efektivitas kontrol internal, ketaatan pada peraturan serta mekanisme beserta pengaturan resikonya. Tujuan audit internal yakni menyalurkan dan garansi bahwasanya penggerakannya bersesuaian pada standar, hukum, serta regulasi yang sedang berjalan (Meidiana dan Erinos, 2020). Hal ini menjadi keperluan BUMDes dalam mengawasinya guna mengevaluasi keakuratan laporan keuangan guna melacak kemajuan organisasi (Diana Maryana & Salsabila Anggriani Sari 2023). Alasan dilakukannya audit internal mencakup peninjauan dan penilaian pengendalian, risiko, manajemen, dan penilaian kinerja keuangan. Audit internal yang efektif dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan BUMDes. Hal ini dapat menanamkan keyakinan pada pemangku kepentingan seperti pemerintah

daerah, investor, dan masyarakat bahwa keuangan BUMDes dikelola dengan benar serta bersesuaian pada kriteria yang berjalan.

Penelitian terkait pengaruh audit internal pada kinerja keuangan dibuktikan dalam kajian Meidiana bersama Erinos (2020) serta kajian Fitri serta Afriyenti (2021) yang menyatakan bahwa audit internal berpositif memengaruhi kinerja keuangan. Hasil sebaliknya diperoleh pada kajian Rahayuningsih dkk (2024) dimana kinerja perusahaan perbankan tidak terkena pengaruh audit internal. Penelitian sebelumnya dilakukan pada sektor perbankan dan peneliti mencoba untuk melakukan penelitian serupa pada BUMDes untuk mengetahui lebih lanjut terkait keberpengaruhannya audit internal pada kinerja keuangan khususnya pada BUMDes.

Audit internal dapat membantu BUMDes dalam mengevaluasi efektivitas dari pengeluaran yang telah dilakukan. Hal ini mencakup pengecekan apakah pengeluarannya bersesuaian pada anggaran yang sudah diputuskan serta apakah hasilnya memadai. Bila ditemukan pengeluaran yang tidak efisien, audit internal dapat memberikan rekomendasi untuk mengurangi biaya yang tidak perlu. Audit internal memiliki peran yang signifikan dalam pengendalian biaya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengendalian biaya memaksa BUMDes guna mencari cara-cara lebih efisien dalam menjalankan operasinya. Ini mungkin termasuk pemilihan vendor yang lebih efisien, penggunaan sumber daya secara optimal, dan pengelolaan inventaris dengan lebih baik. Efisiensi ini membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja operasional secara keseluruhan. BUMDes sering mendapatkan dana dari pemerintah desa atau sumber dana publik lainnya. Dalam konteks ini, pengendalian biaya menjadi sangat penting guna menegaskan

bahwasanya pembiayaan tersebut dimanfaatkan seefektifnya serta bersesuaian pada target utamanya. Menggunakan dana dengan bijak dan menghindari pemborosan adalah kunci dalam mempertahankan dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat (Sihabudin, 2019).

Pengaruh pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan belum banyak diteliti namun terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan Anggreni, dkk (2020) dan Wiranata (2023) dengan pemaparannya yakni pengendalian biaya berpositif memengaruhi kinerja keuangan. Namun pada penelitian Setiani (2020) dinyatakan perolehan berlawanan dimana pengendalian biaya tak memengaruhi kinerja keuangan. Penelitian tersebut dijalankan tidak secara khusus pada BUMDes oleh sebab itu peneliti termotivasi guna mengkaji keberpengaruh pengendalian biaya pada kinerja keuangan pada BUMDes.

Penelitian ini mencoba menggali dan menganalisis hubungan antar variabel-variabel utama yang diyakini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, terutama dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fenomena pelatarbelakangan penelitian yakni banyaknya kasus kecurangan yang melibatkan BUMDes. Variabel *ineffective monitoring* diasumsikan bahwa semakin tidak efektif pemantauan terhadap aktivitas dan transaksi di BUMDes, maka kinerja keuangan BUMDes cenderung menurun. Kurangnya pengawasan dapat memberikan kesempatan bagi praktik-praktik kecurangan dan penyalahgunaan sumber daya. Kemudian melalui audit internal yang efektif, BUMDes dapat mengidentifikasi potensi kecurangan, memperbaiki proses internal, dan meningkatkan transparansi. Hal tersebut didambakan mampu menyalurkan kepercayaan bagi keterkaitan pihaknya dan mendukung kinerja keuangan yang

baik. Kebaikan pengendalian biaya mampu menambah keefisienan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hal ini dapat berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan BUMDes, terutama dalam menghadapi tantangan keuangan yang mungkin muncul.

Secara teoritis teori sinyal sebagai landasan teori memberikan dasar kerangka untuk memahami bagaimana informasi dan tanda-tanda tertentu dapat menjadi indikator kinerja. Ineffective monitoring, yang mencerminkan kurangnya kemampuan pengawasan yang efektif, dapat menjadi sinyal negatif bagi pihak eksternal terkait kinerja BUMDes. Sebaliknya, audit internal, yang merupakan evaluasi independen internal terhadap efektivitas pengendalian, dapat memberikan sinyal positif atau negatif tergantung pada hasilnya. Pengendalian biaya, sebagai upaya untuk mengelola pengeluaran sesuai dengan anggaran, juga dapat menjadi sinyal penting. Keberhasilan dalam pengendalian biaya dapat mencerminkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan dapat dianggap sebagai sinyal positif oleh pihak eksternal. Selain itu, kinerja keuangan BUMDes, yang mencakup aspek profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan pendapatan, merupakan hasil akhir dari interaksi antara monitoring, audit internal, dan pengendalian biaya.

Penelitian ini pengembangan studi sebelumnya yakni kajian dari Yasa dan Sujana pada tahun 2023. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang berbeda, yaitu penggunaan variabel pengendalian biaya sebagai elemen penting dalam analisisnya. Berikutnya, studi inipun mampu memegang karakter tersendiri dalam pemilihan obyek kajiannya, yakni kinerja keuangan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui menggabungkan variabel pengendalian biaya dan fokus pada BUMDes, kajian berikut didambakan mampu menyalurkan pemahaman

terperinci serta relevan terkait dengan sejumlah pemfaktoran sebagai hal memengaruhi kinerja keuangan entitas tersebut. Keadaannya dapat menunjang pengembangan keilmuan dengan lebih optimal tentang cara meningkatkan keberlanjutan keuangan BUMDes dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Sehingga *research gap* dalam penelitian ini ialah *empirical gap* dimana Penekanan pada BUMDes sebagai objek penelitian menjadi keunggulan tersendiri karena BUMDes memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi di tingkat desa. Melalui inilah, peneliti mengusahakan melengkapi kerumpangan empiris dengan mendalaminya lebih lanjut, sehingga memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memegang peranan signifikan saat memulai mengembangkan ekonomi di tingkat desa. Namun, penelitian empiris yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan BUMDes masih terbatas. Sehingga untuk mengisi kekosongan empiris ini menjadi penting untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana BUMDes dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Fokus pada BUMDes membawa penelitian ini ke dalam konteks lokal yang sangat relevan. Desa-desa seringkali memiliki dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang unik. Oleh karena itu, penelitian yang secara khusus meneliti kinerja keuangan BUMDes mampu menyalurkan pemahaman terperinci dan kontekstual mengenai bagaimana pemfaktoran tertentu memberi dampak keberlangsungan ekonomi desa.

Melalui studi inilah diharapkan mampu tercipta gambaran dengan lengkap dan kontekstual mengenai pengaruh variabel pengendalian biaya pada kinerja keuangan BUMDes. Perolehan temuan yang didapatkan nantinya pun mampu

menjadi landasan bagi pengambilan keputusan lebih optimal, yang mencakup ketika pengelolaan BUMDes serta ketika pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Melalui penguraiannya maka penulis terpicat guna menjalankan pengujian yang berhubungan terkait **“Pengaruh *Ineffective Monitoring*, Audit Internal, dan Pengendalian Biaya Terhadap Kinerja Keuangan BUMDes di Kecamatan Sawan”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasar kelatarbelakangannya, maka mampu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yakni:

1. Kecamatan Sawan merupakan kecamatan dengan jumlah BUMDes bermasalah paling banyak yakni terdapat 5 diantara 13 BUMDes yang mengalami permasalahan kinerja keuangan.
2. Adanya masalah dalam pengawasan (monitoring) yang tidak efektif terhadap aktivitas dan operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Sawan. Keadaan inipun mengarah ke kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya kasus-kasus kecurangan pada BUMDes bermasalah di Kecamatan Sawan.
3. Adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya yakni penggunaan variabel bebas berupa pengendalian biaya. Pengendalian biaya pada BUMDes sangat erat kaitannya dengan kinerja keuangan. Penelitian ini akan mencoba memahami sejauh mana faktor internal, seperti audit internal dan pengendalian biaya, berperan dalam kinerja keuangan BUMDes, serta bagaimana faktor

eksternal, seperti kondisi perekonomian nasional, dapat memengaruhi hubungan ini.

1.3 Batasan Masalah

Memperhatikan pengidentifikasian sekaligus pelataran adanya permasalahannya di atas, fokus penelitian terbatas pada masalah yang akan dibahas oleh peneliti karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya, batas waktu, keahlian, dan sumber daya. Peneliti memutuskan batasan permasalahannya untuk membuat kajiannya lebih efektif, sesuai target, serta mudah dimengerti. Oleh karena itulah, peneliti membuat batasan masalah, yakni :

1. Objek penelitian yakni BUMDes di Kecamatan Sawan.
2. Penelitian ini melibatkan responden, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Bendahara BUMDes, bagian keuangan, pengawas BUMDes dan karyawan.
3. Penelitian ini menggunakan variabel independen X1 adalah *Ineffective Monitoring*, X2 Audit Internal, dan X3 Pengendalian Biaya, dengan variabel dependen Y yang merupakan kinerja keuangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar permasalahan dan fokus penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahannya menjadi berikut:

1. Apakah ada pengaruh *ineffective monitoring* pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Sawan?
2. Apakah terdapat pengaruh audit internal pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Sawan?

3. Apakah terdapat pengaruh pengendalian biaya pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Sawan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasar permasalahan serta fokus penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengenalisis pengaruh *ineffective monitoring* pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Sawan
2. Mengenalisis pengaruh audit internal pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Sawan
3. Mengenalisis pengaruh pengendalian biaya pada kinerja keuangan BUMDes di Kecamatan Sawan

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari temuan yang didapatkan penelitian ini dipanatkan harapan mampu menyalurkan tambahan bahan pendukung teori beserta memperluas wawasan serta ilmu khususnya di bidang pendidikan diantaranya yakni.

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diyakini dapat berkontribusi dalam memajukan ilmu ekonomi di bidang akuntansi, khususnya mengenai tiga aspek terkait dampak kurangnya pemantauan, audit internal, dan pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a) Untuk Peneliti

Temuan penelitian ini diyakini mampu meningkatkan serta memperluas wawasan beserta pemberian definisi terkait ke faedah membuktikan pengaruh *ineffective monitoring*, audit internal, serta pengendalian biaya pada kinerja keuangan.

b) Untuk Universitas Pendidikan Ganesha

Temuan penelitian ini diyakini mampu memperdalam referensi serta koleksi perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja sekaligus wawasan kepada pembacanya mengenai peranan krusian membuktikan pada *ineffective monitoring*, audit internal, serta pengendalian biaya pada kinerja keuangan.

c) Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Temuan penelitian ini diyakini mampu menyalurkan kontribusinya dalam bentuk konsep beserta gagasan terkait peranan krusian pembuktian pengaruh *ineffective monitoring*, audit internal, dan pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan.

